

EFEKTIFITAS PENYELENGGARAN DAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG

Welly¹⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
Jln. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Email : welly_lht@yahoo.com¹⁾

ABSTRACT

The aim of this research was to know the effectiveness of implementation and financial management of empowerment national program of independent urban. The type of this research was descriptive by using primer and secondary data. The technique of collecting data was interview and documentation with qualitative data analysis. The result of the study showed that was the effectiveness of the implementation empowerment national program of independent urban to Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Usaha Bersama, Ampera and Duku at district of Ilir Timur II of Palembang was effective, although there were still lack of implementation, like LKM Usaha Bersama is the most effective viewed from indicator of source and target approach that run well. The lack of LKM Usaha Bersama, Ampera and Duku were approach processing, where implementation process and time implementation program were not reached yet because of the lateness of fund. For the effectiveness financial management of PNPM, only LKM Usaha Bersama that followed the direction of financial management viewed by accountability indicator and financial management transparency, where as for LKM Duku and Ampera were not maximal yet viewed by activity report to society.

Keywords: Effectiveness, Accountability, Transparency.

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan di Indonesia, hal ini merupakan hal mendasar dan biasa terjadi namun demikian bukan berarti kemiskinan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan. Berbicara mengenai penanganan kemiskinan banyak menyalahkan pemerintah, padahal untuk penanganan kemiskinan terletak pada masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat dapat membuka diri, menggali potensi diri, memberdayakan diri sehingga masyarakat mampu merubah diri dan meninggalkan kemiskinan. Salah satu cara pemerintah mengurangi kemiskinan adalah dengan mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Hal menarik pada pelaksanaan PNPM adalah cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh pengelola PNPM tanpa terkecuali. Akuntabilitas dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak berkepentingan melakukan pemeriksaan, bertanya dan meminta pertanggungjawaban para pengambil keputusan baik di tingkat program, daerah dan masyarakat. Selain wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, PNPM juga wajib melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip transparansi. Transparansi dalam pelaksanaan PNPM diterapkan dengan memberikan akses kepada pihak berkepentingan untuk mengetahui informasi mengenai konsep PNPM, kebijakan, pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi lainnya.

Kota Palembang yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan dimana setiap kelurahan mempunyai LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat). Salah satunya adalah LKM Duku di Kelurahan Duku, LKM Ampera di Kelurahan 3 Ilir, dan LKM Usaha Bersama di Kelurahan 2 Ilir yang semuanya berada di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Adapun jumlah alokasi dana yang diterima LKM berbeda-beda. Jika dilihat dari jumlah penduduk diketahui jumlah penduduk kelurahan Duku sebanyak 16.628 jiwa, kelurahan 3 Ilir sebanyak 19.212 jiwa dan kelurahan II Ilir sebanyak 21.180 jiwa. Berikut dana ditiga LKM selama tahun 2012-2014:

Tabel 1. Dana BLM Pada LKM Duku, Ampera, Usaha Bersama (dalam rupiah)

Tabel 1. Daftar Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pada LKM Duku, Ampera, Usaha Bersama Tahun 2012-2014

Tahun	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)		
	Duku	Ampera	Usaha Bersama
2012	100.000.000	83.000.000	100.000.000
2013	75.000.000	83.000.000	75.000.000
2014	75.000.000	83.000.000	75.000.000
Total	250.000.000	249.000.000	250.000.000

Sumber: LKM, 2015

Berdasarkan tabel 1 besarnya dana BLM di LKM Duku selama 3 tahun mengalami penurunan sebesar 25%. Untuk LKM Ampera selama 3 tahun tetap sama. Untuk

LKM Usaha Bersama mengalami penurunan sebesar 25% di 2013. Dana yang diberikan kemudian dikelola LKM dan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu dibutuhkan analisis lebih jauh sejauh mana efektifitas penyelenggaraan dan pengelolaan Program Nasional Mandiri Perkotaan dengan menggunakan indikator pendekatan sumber, proses dan sasaran, akuntabilitas dan transparansi dilaksanakan oleh LKM di kelurahan Ilir Timur II Palembang.

Penelitian efektifitas pengelolaan dan penyelenggaraan dana PNPM telah banyak dilakukan, seperti Hutagalung dan Teti (2013), Rizna dan Zalili (2013) dan Masruri (2014) yang menyimpulkan bahwa program PNPM berjalan efektif/tidak dipengaruhi beberapa faktor penghambat seperti SDM dan waktu pelaksanaan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi, pelatihan, pertemuan rutin dan ketegasan pelaksana dilapangan. Penelitian akuntabilitas dan transparansi telah dilakukan Surya (2011), Sucipto (2012), Dwi dkk (2013), Irmawati dan Nurul (2014), Halini (2014), dan Susanto (2015), Choirunnisa dkk (2016) memberikan hasil bahwa pengelolaan dana PNPM harus didukung prinsip akuntabilitas dan transparansi.

A. Tinjauan Pustaka

1) PNPM Mandiri

PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat perkotaan. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP, 2010)

2) Efektivitas

Efektifitas (Agung, 2005: 109) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Mardiasmo (2009: 134) faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kerja dalam organisasi adalah :

1. Waktu, Ketetapan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tingkat efektifitas kerja karena menambah waktu tidak sedikit.
2. Tugas, Bawahan harus diberitahu maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan.
3. Produktifitas, Seseorang harus mempunyai produktifitas yang tinggi dalam bekerja akan dapat menghasilkan efektifitas kerja yang baik.
4. Motivasi, Manajer dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif.

5. Evaluasi kerja, Manajer memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahan, sebaliknya bawahan harus melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikan untuk di evaluasi tugas terlaksana dengan baik atau tidak.
6. Pengawasan, adanya pengawasan kinerja dapat terus terpantau dan dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
7. Lingkungan kerja, Menyangkut tata ruang, cahaya alam dan suara mempengaruhi konsentrasi seseorang karyawan dalam waktu bekerja.
8. Fasilitas, Suatu sarana dan peralatan yang disediakan dalam bekerja. Semakin baik sarana mempengaruhi konsentrasi seorang dalam bekerja.

Hasil penelitian Masruri (2014), mengemukakan pengukuran efektifitas PNPM-MP dengan menggunakan model:

- a. Pendekatan sumber: Staf, Informasi, Wewenang, Fasilitas dan *Channeling*
- b. Pendekatan Proses; Proses pelaksanaan / mekanisme dan Waktu pelaksanaan
- c. Pendekatan Sasaran: Lingkungan, Sosial dan Ekonomi

3) Akuntabilitas

Mardiasmo (2009:21) akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Ellwood (2009: 21) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. *Accountability for probity and legality*, Penghindaran penyalagunaan jabatan (*abuse of power*), dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. *Process accountability*, apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem manajemen, dan prosedur administrasi.
3. *Program accountability*, pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
4. *Policy accountability*, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

4) Transparansi

Transparansi dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi mengenai konsep PNPM, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat. Dalam hal ini, semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan

PNPM harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya secara terbuka melalui berbagai saluran media, seperti pertemuan, media elektronik, media cetakan dan sebagainya (Halim; 2007).

Mardiasmo (2009: 17) Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak berkepentingan, informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

B. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif (Sugiyono, 2012:11-12) Dimana hasil penelitian ini mendeskripsikan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan dana PNPM untuk mengetahui Efektifitas PNPM berdasarkan standar yang ada di petunjuk teknis pengelolaan dana PNPM.

2) Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan yaitu efektifitas penyelenggaraan dana PNPM, dan pengelolaan dana PNPM. Untuk lebih jelas dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Penyelenggaraan Dana PNPM MP	1. Pendekatan Sumber 2. Pendekatan Proses 3. Pendekatan Sasaran
Pengelolaan Dana PNPM MP	1. Akuntabilitas: 2. Transparansi

Sumber : Peneliti, 2015

5) Data yang di Gunakan

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder (Indrianto dan Supomo, 2009: 146-147).Data primer melalui wawancara langsung ke pengelola LKM, sedangkan data sekunder berupa data langsung yang diperoleh dari LKM.

6) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2012: 157-168). Wawancara dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung pada pengelola. Dokumentasi mengumpulkan data laporan alokasi dana, pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri, data laporan penerimaan dan pengeluaran kas.

7) Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif (Sugiyono, 2012: 13-14), dengan menjelaskan kondisi dihubungkan dengan teori dan standar yang ada.

2. Pembahasan

Berikut pembahasan mengenai efektifitas dan pengelolaan keuangan dana PNPM-MP:

A. Analisis Efektifitas Penyelenggaraan PNPM-Mandiri Perkotaan

Efektifitas penyelenggaraan dana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana dana yang diperoleh disetiap LKM dikelola secara efektif dari dana diperoleh (pendekatan sumber), kemudian dana dialokasikan sesuai dengan rencana (pendekatan proses) sampai pencapaian hasil (pendekatan sasaran), berikut pembahasannya:

1) Analisis Pendekatan Sumber

a. Analisis Staf (Tenaga kerja)

Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi untuk LKM Duku dan Ampera, memiliki SDM yang masih kurang serta rasa tanggung jawab masih rendah, terlihat ketika dibutuhkan informasi secara tepat dan cepat tidak bisa dilakukan secara langsung. Kemudian di LKM Ampera terdapat SDM yang tidak sesuai dengan bidang sehingga kesulitan dalam memahami tugas dan tanggung jawab.

Untuk LKM Usaha bersama memiliki staf yang cukup sesuai bidang untuk melaksanakan aktivitas PNPM, dimana jumlah staf yang dimiliki sebanding dengan beban kerja, sehingga tidak terjadi penundaan pekerjaan. Staf di LKM Usaha Bersama sudah memenuhi persyaratan seperti memiliki kemampuan di bidang PNPM, sesuai kualifikasi serta memiliki keterampilan dalam penyelenggaraan aktivitas PNPM.

Melihat kondisi tersebut sebaiknya dilaksanakan Pelatihan Dasar dan Pelatihan Khusus secara rutin sehingga dapat pengembangan kapasitas internal yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan serta pemahaman yang mendalam terhadap PNPM-MP baik secara umum maupun secara teknik.

b. Analisis Informasi Keuangan dan Program

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa LKM Duku dalam segi penyampaian informasi masih kurang karena tidak menyampaikan informasi melalui papan pengumuman. Kurang transparannya keterbukaan menyebabkan kecurigaan masyarakat sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan baik yang berlangsung ataupun akan datang. LKM Ampera menyampaikan informasi cukup baik. LKM Ampera selalu mengumumkan laporan keuangan dipapan pengumuman. Informasi mengenai mekanisme, peraturan-peraturan, metode, petunjuk teknis telah terdistribusi kepada seluruh petugas/fasilitator seperti Buku Petunjuk Operasional (BPO), *Master Schedule* yang terinci dengan baik dan detail sehingga mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh staf yang bertugas dengan baik.

LKM Usaha Bersama dalam hal informasi mengenai pola, mekanisme dan metode pelaksanaan PNPM-MP telah memenuhi persyaratan yang ada, informasi mengenai mekanisme, peraturan-peraturan, metode, petunjuk teknis telah dengan baik terdistribusi ke petugas/fasilitator. Selain informasi tersebut LKM Usaha bersama telah menyampaikan setiap anggaran atau laporan keuangan secara transparan serta diumumkan dipapan pengumuman sekretariat.

c. Analisis Tugas dan Wewenang

Berdasarkan hasil wawancara pada LKM Duku, Koordinator LKM duku sangat memperhatikan setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada bendahara dan sekretaris karena terlihat di LKM duku tidak adanya tumpang tindih pekerjaan, dan semua tugas dipertanggungjawabkan oleh setiap staf yang diberikan wewenang. Wewenang Koordinator LKM Usaha Bersama kepada Bendahara atau pun Sekretaris sudah berjalan dengan baik karena setiap tugas yang diberikan oleh koordinator LKM selalu di selesaikan tepat waktu. Setiap staf mempunyai tugas masing-masing yang diberikan oleh koordinator LKM agar menghindari tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. LKM Ampera, Wewenang koordinator kepada sekretaris dan lain lain sudah berjalan dengan sesuai tugas yang diberikan masing-masing. Koordinator memberikan kepercayaan penuh baik kepada bendahara, sekretaris dan staf-staf yang lain agar melaksanakan tugas sesuai dengan yang diberikan. Namun tidak lepas dari pengawasan koordinator karena setiap pekerjaan ataupun tugas pasti ada sedikit mengalami kekeliruan, dari kejadian tersebut koordinator memberikan pengarahan yang lebih baik lagi.

d. Analisis Fasilitas Yang Dimiliki

Berdasarkan data, LKM duku memiliki fasilitas yang minim dalam melaksanakan kegiatan, fasilitas yang tersedia hanya: Sekretariat dan Fasilitas penunjang (Laptop). LKM Usaha Bersama mempunyai beberapa fasilitas yang sangat mendukung dalam setiap menjalankan kegiatan, seperti : Sekretariat dan Fasilitas penunjang (ATK, Laptop, Printer, papan pengumuman). Kesimpulan yang dapat di ambil LKM Usaha Bersama dan Ampera merupakan LKM yang fasilitasnya sangat memadai untuk menunjang efektifitas dalam melaksanakan kegiatan.

e. Analisis Channeling (Mitra)

Mitra dalam bekerja sangatlah penting, untuk LKM mitra yang dimaksud adalah pemerintah maupun swasta. Pemerintah dalam pengelolaan PNPM mulai dari kecamatan, kelurahan dan masyarakat. Ketiga unsur ini harus bersinergi untuk mencapai tujuan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Sedangkan pihak swasta berupa mitra dalam mempercepat pekerjaan seperti dalam hal pembangunan fisik. Khususnya LKM Usaha Bersama, Ampera, Duku memiliki konsep pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai sektor yang terangkum dalam sektor ekonomi, sektor sosial, sektor lingkungan.

*2) Analisis Pendekatan Proses**a. Analisis Proses Pelaksanaan Berjalan*

Kaitannya dengan PNPM khususnya LKM Usaha Bersama, Ampera, dan Duku, proses merupakan hal utama yang menjadi tujuan, dimana proses yang dilakukan oleh pengelola mulai dari level manajemen pusat sampai dengan pendamping dilapangan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah

ditetapkan. Proses pelaksanaan program dimulai dari usulan dari setiap LKM, kemudian diajukan anggaran untuk disetujui dan teralisasi. Tetapi kenyataan ketika program telah disetujui, pencairan dana sering kali terhambat sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan. Terlihat proyek yang dilaksanakan LKM Ampera sebanyak 3 proyek yaitu pembangunan MCK, gorong-gorong dan pengecoran lorong berjalan baik sesuai rencana, namun hasil informasi diperoleh bahwa waktu pelaksanaan proyek memakan waktu yang cukup lama. Sehingga tidak efisien dalam hal pengelolaan dana pembangunan. Hal ini dikarenakan pencairan dana yang mengalami keterlambatan.

b. Analisis Waktu Pelaksanaan

Kaitannya dengan PNPM-MP khususnya LKM Ampera tidak tercapainya target waktu pelaksanaan dikarenakan terhambatnya dana anggaran yang terlambat cair sehingga program yang dijalankan seperti pembuatan gorong-gorong serta rendahnya kesadaran tanggung jawab dari tenaga kerja dan memakan waktu selama satu tahun. Begitu juga dengan LKM Duku mengenai waktu pelaksanaan untuk LKM duku itu sendiri tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. LKM duku selalu mengulur sehingga pertanggungjawabannya terhambat, maka seharusnya kegiatan bisa dilaksanakan awal tahun, namun karena dana anggaran yang terhambat dan belum bisa dicairkan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan.

Semua kegiatan di LKM Usaha Bersama, dapat dilaksanakan dengan baik hanya saja pencairan dana anggaran sedikit terhambat namun tidak menimbulkan hal buruk karena LKM Usaha bersama telah mencapai target waktu pelaksanaan. Waktu perencanaan dan waktu penyelesaian proyek berlangsung 1 tahun. Semestinya proyek dapat direncanakan dan diselesaikan tepat waktu namun karena keterhambatan dana anggaran yang tidak tentu dapat dicairkan sangat mempengaruhi waktu pelaksanaan.

*3) Analisis Pendekatan Sasaran**a. Analisis Lingkungan*

Bidang lingkungan di kelurahan 3 Ilir Palembang LKM Ampera memiliki 48 KSM mampu bekerja sama dalam pemeliharaan lingkungan yang baik. Untuk kegiatan yang dilakukan LKM Ampera yang telah berjalan, berikut jenis kegiatan yang dilakukan: Pembangunan sarana MCK, Pengecoran lorong dan Gorong-gorong. Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik oleh LKM Ampera dan diharapkan menjadi hal yang positif untuk pembangunan konsep lingkungan yang baik. Bidang lingkungan LKM Usaha Bersama memiliki 5 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang kontribusinya sangat mempengaruhi dalam penyelesaian kegiatan PNPM-MP. Untuk kegiatan lingkungan di LKM Usaha bersama telah berjalan: Pembuatan poskamling, pengecoran lorong dan Gorong-gorong. Selain konsep pelaksanaan kegiatan lingkungan, sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat juga dilakukan mengenai konsep lingkungan/pemukiman yang baik dan sehat, dengan pemahaman yang baik

mengenai hal tersebut maka diharapkan dapat menjadi energi pembangunan konsep lingkungan yang baik dan lestari.

b. Analisis Sosial

Kaitannya bidang sosial pada LKM Usaha Bersama, harus bersosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami tentang PNPM serta menjadi wadah dalam pembelajaran pengembangan kapasitas diri. Bidang sosial di LKM Usaha Bersama telah berjalan, seperti: Pembagian seragam sekolah SD, SMP, SMA, Santunan dan Fogging. Pada LKM Ampera harus meningkatkan sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat lebih memahami tentang PNPM-MP serta menjadi wadah dalam pembelajaran pengembangan kapasitas diri.

4) Analisis Pengelolaan Dana PNPM-MP

a. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM-MP

Analisis pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan LKM. Sistem pembukuan LKM disusun sedemikian rupa, lengkap dengan dokumen dan aturan main pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya LKM memiliki Bukti Kas Keluar (BKK), dimana petunjuk teknis tertuang dalam buku petunjuk teknis pengelolaan dana PNPM.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan unit pengelola LKM Duku belum melakukan pembukuan secara benar dan sesuai dengan buku petunjuk teknis pengelolaan dana LKM, LKM ini hanya membuat laporan pada buku bank LKM, buku pemasukkan dan pengeluaran, nama KSM yang meminjam dana, dan Laporan Laba/Rugi dan Neraca belum semua dilakukan dengan benar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ketua LKM Ampera belum melakukan pembukuan secara benar dan sesuai dengan buku petunjuk teknis pengelolaan dana LKM. LKM ini jarang melakukan laporan keuangan secara periodik dikarenakan LKM ini hanya membuat laporan keuangan melalui buku bank LKM, dan membuat laporan dari Laba/Rugi dan Neraca.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sekretaris LKM menyatakan bahwa LKM Usaha Bersama sudah melakukan pembukuan secara benar dan sesuai buku petunjuk teknis pengelolaan dana PNPM, dimana setiap transaksi yang terjadi dicatat kedalam buku pemindah bukuan, buku bukti kas keluar dan bukti kas masuk. Adanya laporan keuangan secara periodik, membuat buku harian regular, buku kas harian, buku Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Uang LKM, nama KSM yang meminjam dana, Laporan Laba/Rugi dan Neraca membuktikan bahwa LKM Usaha Bersama telah benar dalam melakukan pengelolaan dana LKM.

Analisis dana yang tersalur ke Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) tersalur ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tanpa potongan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus LKM menyatakan bahwa, Pada LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera tidak melakukan potongan untuk dana yang disalurkan kepada Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM), tetapi LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera dalam menjalankan program mempunyai program Tridaya dalam bidang Ekonomi LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera ini menetapkan potongan dana yaitu sebesar 1,5% perbulan bagi masyarakat yang ingin meminjam dana. Dengan sistem pengembalian tanggung renteng. Jadi, dapat di simpulkan bahwa LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera menerapkan sistem yang sama. Yaitu jika ada KSM yang meminjam dana saja yang diberikan potongan sebesar 1,5% perbulan. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama, LKM Duku dan Ampera dalam menyalurkan dana dari LKM ke KSM tanpa potongan.

Analisis tidak adanya penyalahgunaan dan korupsi baik terhadap Biaya Operasional (BOP) LKM maupun penyaluran dana. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sekretaris LKM Usaha Bersama tidak mempunyai selisih penggunaan dana karena, dana yang diterima maupun dana yang terasalurkan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena dana yang di dapat LKM dan pengalokasiannya dilakukan dengan benar seperti jika ingin melakukan pembangunan jalan Rabat beton dana yang digunakan sesuai dan tepat sasaran dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan unit pengelola LKM Duku terdapat selisih karena, dana yang diterima maupun dana yang tersalurkan tidak sepenuhnya dilakukan dengan tepat sesuai standar yang telah ditetapkan. Karena jika ada kegiatan seperti pembuatan gorong-gorong. Dana yang semestinya tersalur semua untuk kepentingan masyarakat tetapi digunakan untuk kepentingan lainnya. Akibatnya masyarakat tidak bisa menikmati fasilitas yang telah dibangun dalam jangka waktu lama.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ketua LKM Duku terdapat selisih karena, dana yang diterima maupun dana yang tersalurkan tidak sepenuhnya dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena kegiatan seperti pembuatan drainase masyarakat tidak bisa menikmati fasilitas yang dibuat karena pembuatan tidak lakukan dengan tepat. Dimana penggunaan dalam jangka waktu yang lama karena dan yang tersalurkan tidak semuanya diberikan untuk pembangunan tersebut.

Analisis Penarikan dana dari rekening Bank Lembaga Keswadayaan Masyarakat di tandatangani 3 orang anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus LKM menyatakan bahwa, jika ada penarikan dana dari rekening Bank LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera harus ditandatangani oleh anggota LKM Usaha Bersama supaya tidak ada penyelewengan dana 3 orang yang punya wewenang dalam hal ini yaitu, ketua, bagian Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Sekretaris. Jadi, dapat di simpulkan bahwa diharapkan untuk LKM mampu menerapkan sistem yang sama karena bisa menghindari dari penyalahgunaan dana dan penyelewengan dana. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa untuk hal ini baik karena

LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera menerapkan sistem yang sesuai standar.

5) Analisis Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perkotaan

Analisis dana yang diterima LKM dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat minimal dilima papan pengumuman informasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat menyatakan bahwa, LKM Usaha Bersama dana BLM dan Alokasi Penggunaan Dananya tersalurkan kepada masyarakat dan diumumkan melalui papan informasi, laporan disampaikan tanggal 5 diawal bulan dan pengumumannya di tempel dilima papan informasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa, BLM dan Alokasi Penggunaan Dana pada LKM Duku tidak semuanya tersalurkan kemasyarakat, danayang diterima dan pengalokasiannya jarang diumumkan kepada masyarakat yang seharusnya menurut buku pedoman diumumkan melalui papan informasi dan disampaikan setiap awal bulan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa, BLM dan Alokasi Penggunaan Dana pada LKM Ampera tidak semuanya tersalurkan ke masyarakat, dan faktor biaya menyebabkan pengumuman jarang ditempel yang seharusnya menurut buku pedoman diumumkan melalui papan informasi dan disampaikan setiap awal bulan.

Analisis laporan keuangan ditempel dilima papan yang strategis dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setiap tanggal 5 diawal bulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa, LKM Usaha Bersama telah melakukan penempelan informasi papan pengumuman mengenai laporan keuangan dan di sampaikan kepada masyarakat setiap tanggal 5 di awal bulan, masyarakat harus diberitahu mengenai laporan keuangan tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap LKM. Jumlah papan ditempel 5 papan informasi.

Analisis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang termasuk daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari diLKM diumumkan kepada masyarakat minimal 5 papan informasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat sekitaran LKM menyatakan bahwa, Usaha Bersama, Duku, Ampera melakukan hal yang sama bagi KSM yang termasuk daftar tunggu agar bisa mengetahui tugas yang akan dilakukan maka dengan demikian informasi disampaikan dengan cara menempel menggunakan 6 papan informasi yang terdapat di masing-masing kelurahan.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera melakukan hal yang sama yaitu mengumumkan kepada KSM agar memudahkan masyarakat untuk melihat informasi.

Analisis Rekening Bank atas nama Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ditandatangani oleh 3 orang anggota LKM. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menyatakan bahwa, Rekening Bank atas nama LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera harus di tandatangi oleh anggota LKM supaya tidak ada

penyelewengan, 3 orang yang punya wewenang dalam hal ini yaitu, ketua, bagian Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Sekretaris. Jadi, dapat di simpulkan bahwa LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera mampu menerapkan sistem ini sehingga tidak ada penyelewengan dana dan menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Analisis setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan dilengkapi dengan papan informasi proyek. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat menyatakan bahwa, LKM Usaha Bersama untuk setiap kegiatan pembangunan dilengkapi dengan informasi papan proyek yang berisi tentang nama kegiatan, volume kegiatan, nilai BLM, Swadaya Sumber dana lain, tanggal pelaksanaan, dan nama KSM pelaksana. LKM Usaha Bersama melakukan perbaikan lingkungan harus dilengkapi nama kegiatan, volume kegiatan, nilai BLM, Swadaya Sumber dana lain, tanggal pelaksanaan, dan nama KSM pelaksana. Masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan ini supaya meningkatkan solidaritas antar masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa LKM Duku dan Ampera setiap kegiatan jarang dilengkapi dengan informasi papan proyek. Begitu juga dalam melakukan perbaikan lingkungan jarang dilengkapi dengan informasi papan proyek, karena faktor biaya dan kurang aktifnya anggota LKM.

3. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan analisis efektifitas penyelenggaraan dana PNPM-MP di Kecamatan Ilir Timur II Palembang disimpulkan bahwa untuk pendekatan sumber yang terdiri dari indikator staf, informasi keuangan, tugas dan wewenang, fasilitas dan *channeling*, hanya tugas dan wewenang yang baik sedangkan untuk staf, informasi keuangan, falitas masih kurang. Pendekatan proses yang terdiri dari indiktor proses pelaksanaan dan waktu pelaksanaan masih terdapat kendala di pelaksanaan dikarenakan proses pencairan dana mengalami terlambatan. Pendekatan sasaran dengan indiktor lingkungan dan sosial, lingkungan dan masyarakat kurang mendukung, kurang partisipasi dan pengawasan terhadap dana PNPM-MP.
2. Berdasarkan analisis pengelolaan dana PNPM-MP dengan indikator akuntabilitas bahwa pertemuan rutin, pembukuan, penyaluran dana, dan penarikan dana telah sesuai dengan buku pedoman teknis. Tetapi untuk indiktor transparansi masih mengalami kendala dimana penggunaan dana, laporan kegiatan sering kali tidak diumumkan di papan informasi yang telah ditetapkan oleh buku pedoman.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, serta melihat kelemahan yang ada, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Berdasarkan Pendekatan sumber pemerintah setempat dan LKM harus menyeleksi pengelola yang terlibat dalam LKM, menambah fasilitas yang mendukung

pekerjaan, serta menjalin hubungan kerjasama dalam rangka mempercepat kegiatan.

2. Berdasarkan Pendekatan Proses seharusnya pemerintah harus lebih konsisten dalam pencairan dana PNPM-MP ehingga tidak mempengaruhi proses pelaksanaan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
3. Berdasarkan Pendekatan sasaran LKM harus lebih melakukan survey dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat sehingga mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tetapt sasaran.
4. Berdasarkan Akuntabilitas diharapkan LKM meningkatkan lagi pembukuan, menganalisis pembukuan sesuai buku pedoman teknis. Serta lebih transparan dalam menyampaikan informasi kegiatan dan informasi keuangan.

Daftar Pustaka

- [1] Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- [2] Anonim. 2010. *Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Penerbit Direktorat Jendral Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum.
- [3] Anonim. 2010. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan LKM Sekretariat Mandiri*. Penerbit Direktorat Jendral Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum.
- [4] Chairunnisa, I Wayan Suwendra, Gede Putu Agus Jana Susila. 2016. Efektivitas Program Dana Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganेशha*. Volume 4. Tahun 2016.
- [5] Dwi, Aryanti dkk. 2013. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pada BKM Betul Kota Malang. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. Volume. 14. Nomor 2. Juli 2013. [Http://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Ai/Article/View/1307](http://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Ai/Article/View/1307)
- [6] Ellwood. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- [7] Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- [8] Halini. 2014. Analisis Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Serasan Timur. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan*. Volume 3 Nomor 4 Tahun 2014. [Http://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Ejafe/Article/View/7866](http://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Ejafe/Article/View/7866)
- [9] Hutagalung, Suparjo dan Teti Armia Argo. 2013. Efektifitas Program Perbaikan Infrastruktur Lingkungan PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Rw 15 Kelurahan Tamansari). Volume 1. Nomor 2.
- [10] Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BEF, Yogyakarta.
- [11] Irmawati dan Nurul Hidayati. 2014. Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Pada UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*. Volume 5. Nomor 1. [Http://Ejournal.Unmuha.Ac.Id/Index.Php/Jam/Article/View/400](http://Ejournal.Unmuha.Ac.Id/Index.Php/Jam/Article/View/400)
- [12] Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi Yogyakarta.
- [13] Masruri. 2014. Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Tahun 2010). *Journal Of Governance And Public Policy* Volume 1. Nomor 1. April 2014 : 53-76.
- [14] Rizna, Shella dan Zaili. 2013. Efektifitas Pelaksanaan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Simpan Pinjam Perempuan Tahun 2012). *Jurnal Eksis*. Volume 5. Nomor 1.
- [15] Sucipto. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Penerima Bantuan Pnpm-Mandiri Perkotaan Samarinda. *Jurnal Eksis*. Volume 8. Nomor 2. Agustus 2012: 2168 – 235. ISSN 0216-6437. [Http://Karyailmiah.Polnes.Ac.Id](http://Karyailmiah.Polnes.Ac.Id)
- [16] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit CV Alfabeta Bandung.
- [17] Surya, Sari. 2011. Analisis Kinerja Dana Bergulir PNPM Mandiri Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Volume 7. Nomor 2. Hal. 101–117. ISSN:0216–1249. Journal.Unpar.Ac.Id/Index.Php/Jurnaladministrasibisnis/Article/.../390
- [18] Susanto, Hari. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pada PNPM Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Situbondo. Tesis. Universitas Jember. [Http://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/62848](http://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/62848)
- [19] The World Bank Group. 2013. *Unit Penanganan Keluhan PNPM Usaha untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Indonesia*.